

RENJA

(RENCANA KERJA)

TAHUN 2015



BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tugas Biro Pemerintahan memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan umum, pengembangan wilayah, pertanahan, otonomi daerah, kependudukan dan catatan sipil serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan tugas tersebut Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pengembangan wilayah, pertanahan, otonomi daerah, pendudukan dan catatan sipil serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, pengembangan wilayah, pertanahan, otonomi daerah, pendudukan dan catatan sipil serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana perangkat daerah di bidang pemerintahan umum, pengembangan wilayah, pertanahan, otonomi daerah, pendudukan dan catatan sipil serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah mempunyai peran mendukung keberhasilan tugas dan fungsi Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai Visi ***"Terwujudnya Sistem Pelayanan Pemerintahan dengan Landasan Otonomi Daerah Dalam Rangka Mensejahterakan Masyarakat"*** diharapkan menjadi jawaban yang positif.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterjemahkan dalam Misi ***"Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan dengan Landasan Otonomi Daerah"*** yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahun 2015, dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BIRO PEMERINTAHAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Pemerintahan tahun 2013 dan capaian Renstra Biro Pemerintahan.
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Biro Pemerintahan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Pemerintahan
- 3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun 2014 Dan Capaian Renstra Skpd

Berdasarkan program dan kegiatan yang ada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD Tahun 2014 termasuk Perubahan Anggaran yaitu sebesar Rp. 24.079.798.000,- dan serapan keuangan sebesar Rp. 4.857.066.970,- atau 20,17%

Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2014 dapat kami jabarkan sebagai berikut :

A. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1. **Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012**
Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 131.480.000,- . Realisasi Keuangan sebesar Rp. 105.463.400,- atau 80,21%.
2. **Bimbingan Teknis Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur-Unsur Geografis (Unsur Buatan)**
Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 154.641.000,- atau 88,37%
3. **Penyelesaian permasalahan status wilayah dan perbatasan gugusan pulau tujuh.**
Kegiatan ini dianggarkan bertujuan untuk memperoleh status kepemilikan atas gugusan pulau tujuh yang secara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam peta wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, masuk juga dalam peta wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-Perubahan) sehingga waktu pelaksanaan kegiatan ini terlalu singkat dan regulasi yang mengatur pelaksanaan penunjukan pengacara masih belum jelas.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,-

B. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Kegiatan Pengadaan Tanah/Lahan Keperluan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.500.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.400.000,- atau 0,64%. Kecilnya serapan dana atas kegiatan ini disebabkan :

- a. Pembebasan lahan untuk sport centre tidak bisa dilaksanakan karena pemilik tanah minta harga Rp. 1.000.000 per/meter persegi, sementara dana dianggarkan sebesar Rp. 400.000,- per/meter persegi.
- b. Pembebasan lahan sisa jalan lingkar timur dari 13 bidang hanya dapat dibebaskan 6 bidang, sedangkan sisanya ada yang menolak ganti rugi sengketa batas dan belum lengkap persyaratan administrasi

2. Kegiatan Pengsertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 472.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.559.480 atau 16,20%. Kecilnya serapan dana atas kegiatan ini disebabkan :

- a. Banyaknya plang tanah milik provinsi yang dipasang telah hilang.
- b. Tidak jelasnya batas tanah kiri dan kanan karena tidak ada patok batas tanah di lapangan
- c. Belum adanya koordinasi bidang aset (DPPKAD) dengan pemerintah daerah setempat terutama dilingkungan desa/kelurahan mengenai keberadaan aset milik pemerintah provinsi tersebut
- d. Sebagian tanah yang akan disertifikatkan masuk ke kawasan hutan lindung
- e. Sudah disertifikatkan oleh pemerintah daerah setempat
- f. Tidak diketahui lagi letak keberadaan tanahnya dan sebagian tanah telah dipakai/diakui oleh masyarakat atau pihak ketiga sebagai pemiliknya
- g. Terdapat bidang tanah yang sama diajukan juga pensertifikatannya oleh dinas lain dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai contoh : aset P3D yang berada di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari 5 bidang yang telah diukur ternyata 3 bidang juga diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga 3 bidang di tunda pensertifikatannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah)

C. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1. Peningkatan SDM Pengelola SIAK Terintegrasi dengan E-KTP

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 147.918.000,- atau 81,95%.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Sipil

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 130.271.800,- atau 80,27%

3. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 90.059.400,- atau 90,06%

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 219.020.100,- atau 87,61%

5. Fasilitasi Penggunaan Data Kependudukan

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 61.731.000,- atau 61,73%

6. Pendayagunaan Data Kependudukan

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 212.634.400,- atau 85,05%

7. Sosialisasi Kebijakan Bidang Pencatatan Sipil

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.125.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 77.143.700,- atau 61,71%

8. Fasilitasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 pada 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini tidak dilaksanakan, dikarenakan peraturan perundangan yang belum jelas

9. Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan melalui Media

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.132.705.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 70.070.000,- atau 52,80%

D. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.419.850.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 243.533.100,- atau 58,00%

Kecilnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan adanya aturan tentang pelaksanaan rapat di luar kantor pemerintah, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan penghematan yaitu pelaksanaannya menggunakan ruang pertemuan milik pemerintah daerah.

2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Prov. Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.249.312.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 226.783.500,- atau 90,96%

3. Penyusunan Buku Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.231.300.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 221.304.100,- atau 95,68%

4. Sosialisasi tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengisian Indikator Kinerja Kunci

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.136.250.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 132.055.900,- atau 96,62%

5. Fasilitasi Pelaksanaan RAD PPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.168.135.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 153.949.690,- atau 91,56%

6. Penyebarluasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.58.985.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 49.900.400,- atau 84,60%

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan Fasilitasi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.53.860.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 50.283.000,- atau 93,36%

2. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.93.800.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 54.512.100,- atau 58,12%

Kecilnya realisasi keuangan kegiatan ini disebabkan adanya aturan tentang pelaksanaan rapat di luar kantor pemerintah, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan penghematan yaitu pelaksanaannya menggunakan ruang pertemuan milik pemerintah daerah.

3. Fasilitasi Pengelolaan Aset dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Prov. Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.186.250.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 144.990.500,- atau 77,85%

4. Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.380.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 166.233.150,- atau 82,96%

F. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1. Partisipasi Iuran APPSI dan Keikutsertaan dalam Lokakarya/Rakornas APPSI

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.62.280.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 56.102.500,- atau 90,08%

G. Program Penataan Daerah Otonomi Daerah

1. Strategi Peningkatan PAD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.199.060.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 172.552.200,- atau 86,68%

2. Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Percepatan Otonomi Daerah

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.115.100.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 110.871.800,- atau 96,33%

3. Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.231.094.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 215.141.300,- atau 93,10%

4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.196.200.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 186.574.000,- atau 95,09%

5. Fasilitasi Penataan Urusan/Kewenangan di Prov. Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.238.502.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 224.196.700,- atau 94,00%

H. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan

1. Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.163.730.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 149.463.400,- atau 91,29%

2. Penyusunan Database Administrasi Desa/Kelurahan

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.133.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 119.567.100,- atau 89,90%

3. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.155.400.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 143.543.750,- atau 92,37%

4. Fasilitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.229.100.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 208.035.800,- atau 90,81%

5. Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.178.200.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 146.233.100,- atau 82,06%

6. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.164.470.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 157.647.000,- atau 95,85%

I. Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada

1. Fasilitas Persiapan Pemilu Legislatif dan Verifikasi Ulang Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPRD Terpilih.

Kegiatan ini secara fisik telah selesai dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.160.000.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 141.680.700,- atau 88,55%

Untuk melihat lebih jelas mengenai evaluasi pelaksanaan rencana kerja Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2014 dan capaian Renstra dan Laporan Realisasi Kegiatan serta kendala dan langkah tindak lanjut yang diperlukan pada Biro Pemerintahan dapat dilihat pada lampiran I

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Di Biro Pemerintahan

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Gubernur selain sebagai pelaksana asas desentralisasi juga melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya berdasarkan asas dekonsentrasi. Dalam rangka sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2010, Gubernur memiliki tugas dan wewenang melaksanakan urusan pemerintahan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- c. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- e. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;
- g. memelihara stabilitas politik;
- h. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan
- i. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian sejak diimplementasinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pada kenyataannya bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana sebagai provinsi yang umurnya masih relatif muda dibanding provinsi lainnya. Permasalahan dan kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Masih disharmoninya hubungan dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Masih disharmoninya hubungan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal di daerah;
- c. Perbedaan persepsi terhadap kebijakan desentralisasi / otonomi daerah;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan urusan masing-masing bidang;

- e. Masih belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah (antar daerah, luar negeri dan pihak ketiga);
- f. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- g. Prasarana lahan untuk kepentingan umum dan instansi pemerintah yang belum memadai;
- h. Belum terselesainya sengketa batas daerah antar kab/kota dan antar provinsi;
- i. Belum optimalnya pelaksanaan dan sistem kependudukan yang berbasis e-government.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur hanya dapat efisien dan efektif jika didukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang otonom, pembinaan dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah serta optimalisasi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah kab/kota dan unsur Pimpinan Daerah serta instansi vertikal tingkat provinsi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2015.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2015.
3. Indikator kinerja Biro Pemerintahan Tahun 2015.
4. Kelompok sasaran Biro Pemerintahan Tahun 2015.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2015.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan Biro Pemerintahan Tahun 2015.
2. Mengevaluasi Renja Biro Pemerintahan Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Tahun 2015.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun program kerja dan kegiatan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2015 yakni :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
 1. Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan

3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Se-Provinsi Kepulauan Bangka
 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyusun LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 6. Sosialisasi tentang tata cara penyusunan dan pengisian indikator kinerja kunci LPPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Fasilitasi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016
 2. Optimalisasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 3. Pembinaan Penyusunan Laporan Manajerial
 4. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Rakor Teknis dan Sinkronisasi Pergub Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah, Bantuan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Lainnya dan BUMD
- c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
1. Pelatihan Strategis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Manajemen Kas
 2. Evaluasi Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 3. Penyusunan Database Sumber Pendapatan Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1. Partispasi Juran APPSI dan Keikutsertaan dalam Lokakarya /Rakornas APPSI.
 2. Rakor Kerjasama Daerah kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Fasilitasi Optimalisasi Penyiapan Kesepakatan Kerjasama Daerah
 4. Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri
 5. Fasilitasi Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
 6. Pengembangan Kerjasama Daerah Pelayanan Publik dan Perbatasan Kabupaten/Kota.
- e. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1. Fasilitasi Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan
1. Evaluasi Kinerja Kecamatan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 3. Rapat Koordinasi Camat se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 4. Penyusunan Database Administrasi Desa/Kelurahan
 5. Fasilitasi Penataan Desa/Kelurahan dan Kecamatan
- g. Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada
1. Fasilitasi Persiapan Pemilukada dan Pelantikan 4 (empat) Bupati/Wakil Bupati
- h. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1. Fasilitasi Penggunaan Data Kependudukan
 2. Layanan Media Center Informasi Kependuduk
 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 4. Pendayaan Data Kependudukan
 5. Pengembangan Bank Data Kependudukan
 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan sipil
 7. Peningkatan kapasitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk
 8. Penyusunan Data Kelahiran Tingkat Provinsi
 9. Penyusunan Proyeksi Kependudukan
 10. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi

11. Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan
12. Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil
13. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
14. Sosialisasi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Media

i. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

1. Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota
2. Inventarisasi Pendataan Penamaan dan Pembakuan Unsur Rupa Bumi (Unsur Buatan)

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 serta matrik rencana kerja Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dalam lampiran II.